



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

1721 - A2

NOMOR : P1/

☐

Pembetulan Ke

☐

Pembatalan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

1 2 1 2

TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 0320124080282000
A.2 NIP/ NRP : 198202082025211048
A.3 NAMA : MUHAMMAD ALWAN SUWANDI

A.5 NAMA JABATAN : Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) Penyelia

A.6 JENIS KELAMIN : ☒ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN

A.7 NIK : 3201240802820002

A.4 PANGKAT/ : V/V
GOLONGAN

A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / 02

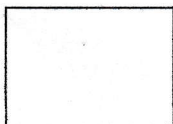
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI POKOK / PENSIUN		10.046.000
2. TUNJANGAN ISTRI		1.004.600
3. TUNJANGAN ANAK		401.840
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL		0
6. TUNJANGAN BERAS		1.158.720
7. TUNJANGAN KHUSUS		132
8. TUNJANGAN LAIN - LAIN		0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)		12.611.292
PENGURANG		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN		630.564
11. IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT		0
12. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)		630.564
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 -13)		11.980.728
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)		11.980.728
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		67.500.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)		29.617.000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1.480.850
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21. PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22. PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)		0
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		0
23a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0
24. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		0
24a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah :
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARAWANG - JABAR (03)
D.3 ID Sub Unit Organisasi :
D.4 Tanggal : 3 1 1 2 2 0 2 5
D.5 NAMA PENANDATANGAN : TETI SRI MULYATI
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆
informasi@pajak.go.id ◆ pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-63581/CT/KPP.3308/2026
Tanggal : 17 Maret 2026

NPWP : 3201240802820002
Nama Wajib Pajak : MUHAMMAD ALWAN SUWANDI
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 17 Maret 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.